



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MADIUN
Jalan D.I Panjaitan No. 09 Madiun Jawa Timur (63173)
Telepon (0351) 462314 - Faks (0351) 463242
Email : dpmptsp.madiunkota @gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MADIUN
NOMOR : 065/05/401.106/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;

6. Perda No 12 tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
8. Peraturan Daerah Kota Madiun No 04 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Madiun No 04 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pinjaman Modal untuk Usaha Kecil Menengah melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
12. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsinya Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun meliputi :

1. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)
3. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perluasan Izin Usaha Industri
4. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)

5. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
6. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
7. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)
8. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
9. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)
10. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Pendidikan Formal (PF)
11. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan AMDAL
12. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk UKL UPL
13. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen SPPL
14. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
15. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
16. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
17. Standar Pelayanan Penerbitan Komitmen Izin PRT Alat Kesehatan Dan PKRT
18. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan
19. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek
20. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat
21. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit
22. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit
23. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik
24. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium Klinik
25. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
26. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

27. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kolektif Pembangunan Perumahan
28. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi
29. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
30. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bertahap Untuk Gedung Lebih Dari Delapan Lantai Dan Atau 2000 Meter Persegi
31. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Bukan Untuk Kepentingan Umum
32. Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung Rumah Tinggal Bukan Untuk Kepentingan Umum.
33. Izin Praktik Perawat (SIPP)
34. Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
35. Izin Praktik Bidan (SIPB)
36. Izin Tenaga Kerja Teknik Kefarmasian (SIKTTK)
37. Izin Praktek Apoteker (SIPA)
38. Izin Praktik Ahli Teknologi LAB MEDIK (ATLM)
39. Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
40. Izin Praktek Fisioterapis (SIPF)
41. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
42. Izin Kerja Perekaman Medis (SIKPM)
43. Izin Praktik Elegtromagntik (SIP-E)
44. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
45. Izin Kerja Radiografer (SIKR)
46. Izin Kerja Ortotis Prostetic (SIKROP)
47. Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)
48. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
49. Izin Praktik Okupasi Terapis
50. Izin Kerja Tenaga Sanitarian(SIKTS)
51. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
52. Izin Praktek Dokter Hewan
53. Izin Praktik Akupunturis
54. Izin Kerja Akupunturis
55. Izin Kerja Optometis
56. Izin Praktik Ortotis Prostetic (SIPROP)
57. Izin Kerja Teknis Kardiovaskuler

58. Pemberian rekomendasi pinjaman dana bergulir PD BANK DAERAH Kota Madiun Bagi UMKM Kota Madiun.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal : **17 Februari 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MADIUN



HARUM KUSUMAWATI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680219 198903 2 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA MADIUN**

Nomor : 065 / 05 /401.106/2020

Tanggal : 17 Februari 2020

GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menempati lokasi di jalan Mayjend DI. Panjaitan No 09 Kota Madiun dan mulai operasional pada tanggal 03 Januari 2017. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun terbentuk berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kewenangan dan tupoksinya diatur dalam Perwal Kota Madiun Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

I. DASAR HUKUM

Tabel jenis izin dan non izin dan dasar hukum

NO.	IZIN/NON IZIN	DASAR HUKUM
1.	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata
2.	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan
3.	Pemenuhan Komitmen Perluasan Izin Usaha Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan
4.	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan - Peraturan Daerah Kota Madiun No 16 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan, dan Tanda Daftar Perusahaan
5.	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan Ni. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 13 Tahun 2017 tentang Penatan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat
6.	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat

7.	Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP MB)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan - Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 08 Tahun 2017 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8.	Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan, dan Tanda Daftar Perusahaan
9.	Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 05 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
10.	Pemenuhan Komitmen Pendidikan Formal (PF)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 05 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
11.	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kreteria - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan - Peraturan Walikota Madiun No. 36 Tahun 2017
12.	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk UKL UPL	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kreteria - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan - Peraturan Walikota Madiun No. 36 Tahun 2017
13.	Pemenuhan Komitmen SPPL	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kreteria - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan - Peraturan Walikota Madiun No. 36 Tahun 2017
14.	Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, dan Kreteria - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJENS/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan
15.	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
16.	Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
17.	Pemenuhan Komitmen Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
18.	Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
19.	Pemenuhan Komitmen Izin Apotek	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
20.	Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
21.	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
22.	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan

23.	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
24.	Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium Klinik	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
25.	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
26.	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
27.	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kolektif Pembangunan Perumahan	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
28.	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi	- Peraturan Daerah Kota Madiun No. 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
29.	Pemenuhan Komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung - Perda 8. Peraturan Daerah Kota Madiun No. 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
30.	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bertahap Untuk Gedung Lebih Dari Delapan Lantai Dan Atau 2000 Meter Persegi	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
31.	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Bukan Untuk Kepentingan Umum	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
32.	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung Rumah Tinggal Bukan Untuk Kepentingan Umum	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 07 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kota Madiun No. 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
33.	Izin Praktik Perawat (SIPP)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
34.	Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
35.	Izin Praktik Bidan (SIPB)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
36.	Izin Tenaga Kerja Teknik Kefarmasian (SIKTTK)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
37.	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
38.	Izin Praktik Ahli Teknologi LAB MEDIK (ATLM)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
39.	Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
40.	Izin Praktek Fisioterapis (SIPF)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
41.	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
42.	Izin Kerja Perekaman Medis (SIKPM)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
43.	Izin Praktik Elektromagnetik (SIP-E)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
44.	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
45.	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
46.	Izin Kerja Ortosis Prostetic (SIKROP)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
47.	Izin Praktek Terapis Wicara	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang

	(SIPTW)	Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
48.	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
49.	Izin Praktik Okupasi Terapis	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
50.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian(SIKTS)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
51.	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
52.	Izin Praktek Dokter Hewan	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
53.	Izin Praktik Akupunturis	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
54.	Izin Kerja Akupunturis	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
55.	Izin Kerja Optometis	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
56.	Izin Praktik Ortotis Prostetic (SIPROP)	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
57.	Izin Kerja Teknis Kardiovaskuler	- Peraturan Daerah Kota Madiun No 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.
58.	Pemberian rekomendasi pinjaman dana bergulir PD BANK DAERAH Kota Madiun Bagi UMKM Kota Madiun	- Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pinjaman Modal untuk Usaha Kecil Menengah melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

II. SARANA DAN PRASARANA

Sarana penunjang kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Tanah bangunan kantor 1 (satu) buah seluas 1.061 m2.
- b. Kendaraan roda empat dan Kendaraan roda dua
- c. Komputer
- d. Printer
- e. Televisi
- f. Laptop
- g. CCTV
- h. mesin foto copy
- i. LCD projector
- j. Mesin faximili
- k. Roll Banner
- l. Filling Cabinet
- m. Sarana penunjang lainnya

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan perizinan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada bidang pelayanan.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh masing masing kepala Bidang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dibawah kendali kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

V. JUMLAH PELAKSANA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun memiliki 35 karyawan (26 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak dan 7 orang tenaga upahan) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang Eselon II/b
2. Sekretaris Dinas : 1 orang Eselon III/a
 - Ka. Sub bagian Umum dan Keuangan : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 6 orang
 - Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang
3. Kepala Bidang Penanaman Modal : 1 orang Eselon III/b
 - Kasi Pengembangan dan Promosi : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang
 - Kasi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal : 1 orang Eselon IVA
 - Staf : -
4. Kepala Bidang PTSP : 1 orang Eselon III/b
 - Kasi Pelayanan Perekonomian : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 4 orang
 - Kasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 3 orang
 - Kasi Pelayanan Pembangunan dan Pembangunan : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 3 orang
5. Kepala Bidang Koperasi : 1 orang Eselon III/b
 - Kasi Pemberdayaan Koperasi : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang
 - Kasi Kelembagaan Koperasi : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang
 - Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	b. Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan	c. Pegawai berdasarkan jenis kelamin
<ul style="list-style-type: none"> - SD : 2 orang - SLTA : 6 orang - SARMUD/D3 : 2 orang - STRATA 1 : 22 orang - STRATA 2 : 3 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan IV : 5 orang - Golongan III : 15 orang - Golongan II : 4 orang - Golongan I : 2 orang - PTT/Kontrak : 2 orang - Upahan : 7 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 16 orang - Perempuan : 19 orang

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, tidak ada makelar atau calo

Jaminan penyelenggaraan pelayanan perizinan didasarkan pada Standar Pelayanan, visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dan maklumat pelayanan yang terpasang pada ruang pelayanan.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan adanya keabsahan dokumen izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai dilakukan secara berkala yaitu satu bulan sekali dan dilakukan insidental (pada saat timbul permasalahan).

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA MADIUN



HARUM KUSUMAWATI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19680219 198903 2 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA MADIUN**

NOMOR : 065/05/401.106/2020

TANGGAL : 17 Februari 2020


STANDAR PELAYANAN

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA MADIUN**

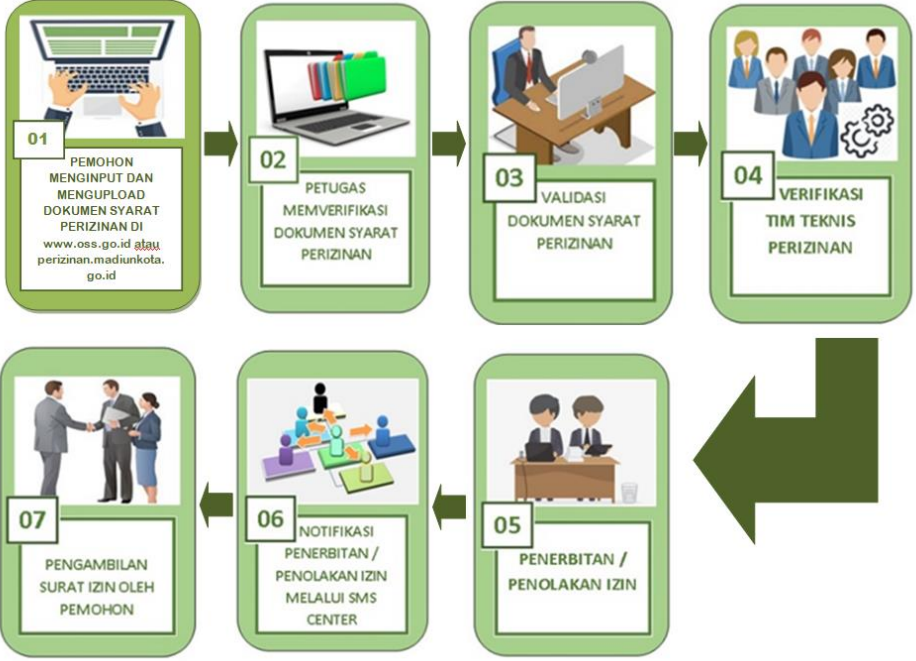
1. JENIS PELAYANAN : Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lokasi 3. Scan Izin Lingkungan (SPPL / AMDAL / UKL UPL) 4. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Scan SLF
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Atas Nama Gumiran - (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun

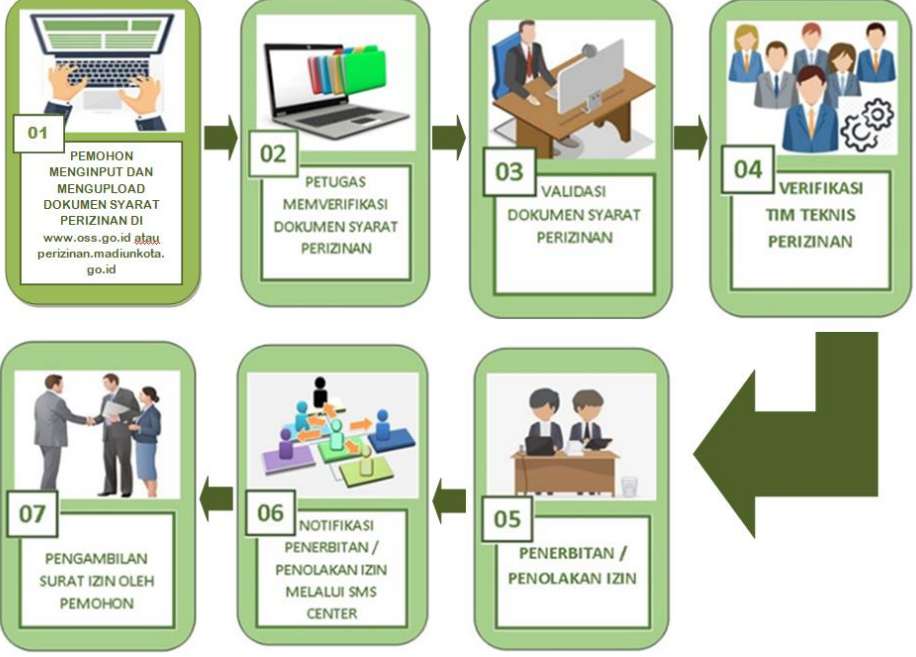
2. JENIS PELAYANAN : Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lokasi 3. Scan Izin Lingkungan (SPPL / AMDAL / UKL UPL) 4. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Scan SLF
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR 01[01 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERIZINAN DI www.oss.go.id atau perizinan.madiunkota.go.id] --> 02[02 PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 02 --> 03[03 VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 03 --> 04[04 VERIFIKASI TIM TEKNIS PERIZINAN] 04 --> 05[05 PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN] 05 --> 06[06 NOTIFIKASI PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN MELALUI SMS CENTER] 06 --> 07[07 PENGAMBILAN SURAT IZIN OLEH PEMOHON] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Atas Nama Gumiran (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun

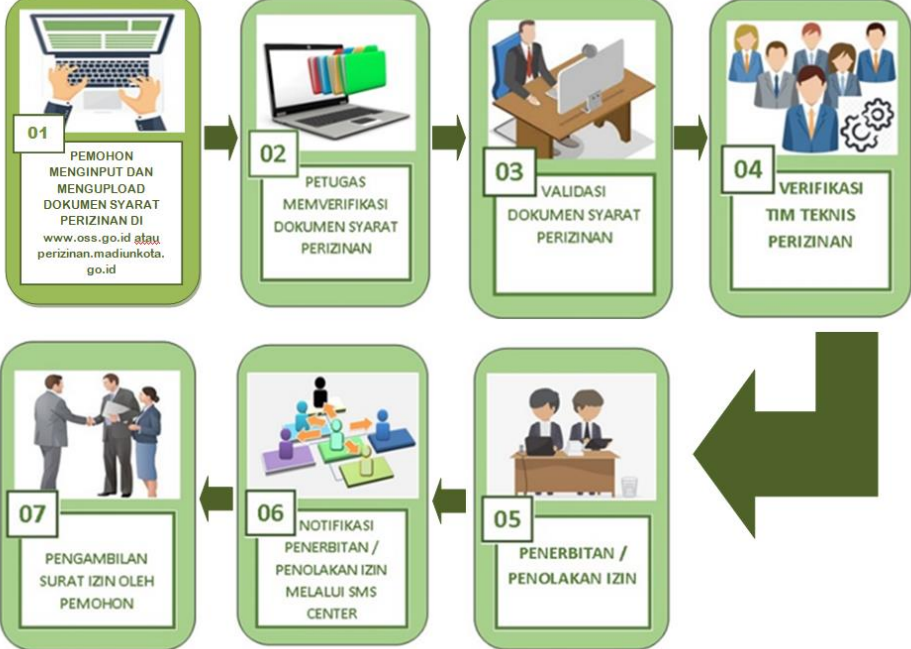
3. JENIS PELAYANAN : Pemenuhan Komitmen Perluasan Izin Usaha Industri

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lokasi 3. Scan Izin Lingkungan 4. Scan IMB 5. Scan SLF
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR 01[01 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERIZINAN DI www.oss.go.id atau perizinan.madiunkota.go.id] --> 02[02 PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 02 --> 03[03 VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 03 --> 04[04 VERIFIKASI TIM TEKNIS PERIZINAN] 04 --> 05[05 PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN] 05 --> 06[06 NOTIFIKASI PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN MELALUI SMS CENTER] 06 --> 07[07 PENGAMBILAN SURAT IZIN OLEH PEMOHON] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Pemenuhan Komitmen Perluasan Izin Usaha Industri
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Atas Nama Gumiran - (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun

4. JENIS PELAYANAN : Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lokasi 3. Scan Izin Lingkungan 4. Scan IMB 5. Scan SLF
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR 01[01 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERIZINAN DI www.oss.go.id atau perizinan.madiunkota.go.id] --> 02[02 PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 02 --> 03[03 VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 03 --> 04[04 VERIFIKASI TIM TEKNIS PERIZINAN] 04 --> 05[05 PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN] 05 --> 06[06 NOTIFIKASI PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN MELALUI SMS CENTER] 06 --> 07[07 PENGAMBILAN SURAT IZIN OLEH PEMOHON] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Atas Nama Gumiran (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun

5. JENIS PELAYANAN : Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Scan Izin Lokasi 3. Scan Izin Lingkungan 4. Scan IMB 5. Scan SLF
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD 01[01 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERIZINAN DI www.oss.go.id atau perizinan.madiunkota.go.id] --> 02[02 PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 02 --> 03[03 VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERIZINAN] 03 --> 04[04 VERIFIKASI TIM TEKNIS PERIZINAN] 04 --> 05[05 PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN] 05 --> 06[06 NOTIFIKASI PENERBITAN / PENOLAKAN IZIN MELALUI SMS CENTER] 06 --> 07[07 PENGAMBILAN SURAT IZIN OLEH PEMOHON] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari
4.	Biaya/tarif	gratis
5.	Produk layanan	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Atas Nama Gumiran (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun